

Regionalisme dan Kestabilan Kawasan: Keterlibatan Uni Eropa dalam Penyelesaian Konflik Transnistria

Iris Dian Susmita

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: irisdians@gmail.com

Abstract

1990 saw the beginning of conflict in Transnistria. It is caused by linguistic differences between the Moldavians and Transnistrians. The prolonged conflict results in riots and unfavourable conditions in the region and forces countries to intervene. It also threatens stability in Europe. Thus, the European Union, as an international organisation that promotes stability between member and non-member countries, also intervenes to help resolving the conflict. With strong constitution and authority, many hope that the EU is able to resolve it. This research analyses European Union involvement by looking through regionalism in relation to regional stability as part of Transnistrian conflict resolution.

Kata Kunci: *European Union, Transnistria Conflict, Regionalism, Regional Stability, Conflict Resolution.*

Keterlibatan Uni Eropa (UE) pada konflik Transnistria merupakan sebuah anomali dalam konteks keterlibatan tersebut menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 1990-an, konflik di Transnistria merupakan konflik dengan tingkat terendah atas keterlibatan Eropa dalam resolusi konflik. Dengan adanya *European Neighborhood Policy* (ENP) pada tahun 2003 dan 2004 serta adanya perluasan Uni Eropa, perkembangan konflik ini telah berubah dengan cepat. Dalam strategi keamanannya, Uni Eropa menegaskan keinginan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam penyelesaian konflik regional, sementara pada saat yang sama mengungkapkan niat untuk membangun ENP yang stabil. ENP bertujuan untuk mewujudkan keinginan untuk menciptakan kapasitas operasi bagi Uni Eropa untuk membantu negara-negara tetangganya dalam transformasi politik dan ekonomi seiring dengan usaha Uni

Eropa untuk menjadi lebih aktif dalam penyelesaian konflik.

Uni Eropa sebagai Regionalisme

Keterlibatan UE di Transnistria merupakan salah satu langkah untuk menjaga stabilitas kawasan salah satunya diwujudkan dengan melakukan upaya resolusi konflik di Transnistria. Sebagai organisasi internasional, UE merupakan salah satu organisasi yang mampu menciptakan lembaga supranasional yang efektif dalam mengatur interaksi antar negara anggotanya maupun non anggota. Hal ini terlihat dari awal mula pembentukan UE yang menginginkan adanya integrasi kawasan Eropa. Diawali dengan adanya kejasama ekonomi kemudian berkembang menjadi kerjasama di segala bidang baik politik maupun budaya. Tiga komunitas besar pada tahun 1950an yakni European Coal and Steel Community (ECSC), European

Atomic Energy Community (Euratom) dan European Economic Community (EEC) merupakan asal mula terbentuknya UE. Terbentuknya UE kemudian tidak lepas dari perkembangan,

transformasi serta perluasan yang terjadi di dalam organisasi. UE sebagai organisasi internasional didasarkan dan diatur pada perjanjian-perjanjian yang disetujui oleh para anggotanya atau disebut dengan *Rule of Law*. Melalui traktat Lisbon, menegaskan adanya nilai-nilai yang dijunjung oleh UE yakni menjunjung hak asasi manusia, menegaskan demokrasi, persamaan serta kebebasan. Sekaligus menegaskan identitas Uni Eropa di kancah internasional, memperkuat hak dan kepentingan warga negara Uni Eropa, memastikan Uni Eropa adalah wilayah kebebasan, keamanan dan keadilan (Diez, Manners & Whitman 2011). Enam negara yang kemudian menjadi 27 negara anggota merupakan bukti nyata bahwa UE sebagai organisasi internasional di Eropa mampu menciptakan integrasi yang kuat didalam kawasan tersebut. Diimbangi dengan adanya institusi, badan hukum, pemakaian mata uang tunggal, serta berbagai kebijakan lainnya, UE sebagai regionalisme memiliki tanggung jawab penting atas kestabilan kawasan khususnya di Eropa. Regionalisme di UE yang menyediakan otoritas kontrol wilayah, kemudahan dalam berinteraksi serta kekuatannya dalam menggunakan legitimasi terhadap institusi dan badan hukum yang dimiliki kemudian membuat UE sebagai salah satu organisasi internasional yang cukup berhasil dalam memberikan kontribusinya baik terhadap negara anggota maupun dunia internasional (Downs 2002).

Perkembangan UE turut berdampak pada adanya tuntutan perubahan

tatanan Eropa secara internal maupun eksternal (Smith 1996). Tuntutan eksternal yaitu dengan adanya harapan bahwa UE dapat berperan secara signifikan dalam dunia politik

internasional. Tidak hanya itu UE juga diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam maupun di sekitar kawasan UE. Di sekitar kawasan UE, UE tidak bisa membatasi diri pada ekonomi dan bidang politik saja, namun juga perlu untuk menjamin stabilitas, mencegah konflik dan mengelola krisis. Untuk itu kemudian diperlukan sebuah kebijakan yang memudahkan UE dalam berhubungan dengan negara non anggota. Salah satunya melalui ENP, ENP bertujuan

ENP juga membantu mengatasi permasalahan perbatasan wilayah langsung yang berbatasan dengan negara-negara anggota UE

agar dapat membagi manfaat perluasan yang dilakukan oleh UE terhadap negara-negara tetangga di sekitarnya. Selain itu ENP juga membantu mengatasi permasalahan perbatasan wilayah langsung yang berbatasan dengan negara-negara anggota UE. ENP mengatur hubungan UE dengan negara-negara disekitarnya, terdapat 16 negara yang diatur dalam kebijakan ini, terdiri atas bagian selatan dan timur. Negara tetangga UE bagian selatan terdiri atas negara Aljazair, Mesir, Israel, Yordania, Lebanon, Libya, Maroko, Palestina, Syria, dan Tunisia. Sedangkan di bagian timur terdiri atas negara Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova dan Ukraina (EUEA 2016). Sedangkan Rusia dan EU memiliki hubungan bebasis bilateral. ENP mendukung reformasi politik dan ekonomi di negara-negara tetangga Eropa sebagai sarana untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran ekonomi di seluruh wilayah. Kebijakan ini juga dirancang untuk memberikan penekanan lebih besar terhadap hubungan bilateral antara UE dan masing-masing negara tetangga.

Tujuan UE adalah untuk menjamin stabilisasi geopolitik Eropa dengan

melakukan penyebaran peningkatan dan pemerintahan politik yang demokrasi. Untuk itu kemudian peran UE menjadi penting dalam mewujudkan stabilitas kawasan Eropa. Bagaimanapun hal ini terkait dengan salah satu tujuan UE yakni untuk menjamin stabilisasi geopolitik Eropa dan dengan menyebarkan peningkatan ekonomi dan pemerintahan politik sesuai dengan demokrasi (Kamos t.t). UE bertugas untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan bagi negara anggota maupun non anggotanya, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya secara internal namun juga secara eksternal. Dalam menjaga stabilitas kawasan salah satunya dapat diwujudkan dalam upaya penyelesaian konflik. UE sebagai organisasi regional berperan sebagai pihak ketiga atau pihak eksternal. Yakni UE sebagai pihak ketiga dapat mempengaruhi *peace-making* di wilayah negara ENP melalui beberapa hal. Diantaranya yaitu melalui negosiasi, mediasi, serta menyeimbangkan *conflict settlement* dan pendekatan resolusi konflik (Dannreuther 2004). Dalam kerangka kerja yang dimiliki oleh UE, dapat berkontribusi dalam menyajikan alternatif maupun solusi institusional dalam menyelesaikan konflik. Kerangka kerja yang dimaksud meliputi pemerintahan, keanggotaan warga negara serta perbatasan wilayah. Masing-masing dapat mendorong hubungan langsung UE dengan masing-masing negara (Tocci 2004). Selain itu UE dapat menggunakan kerangka kerja secara maksimal melalui pembuatan kebijakna- kebijakan di segala bidang untuk menunjang upaya penyelesaian konflik. Sebagai aktor, UE dapat memberikan pilihan melalui kebijakannya untuk menawarkan sebuah pilihan yakni dengan menawarkan kenaggotaan penuh bagi negara yang berkonflik. Dengan begitu maka akan ada upaya untuk menyelesaikan konflik bagi negara yang memang ingin bergabung dengan UE (Tocci 2004).

UE menggunakan beberapa instrumen seperti diplomasi, aspek militer mapupun aspek sipil. Dalam negosiasi dan mediasi UE menurut Bercovitch (1991) merupakan bentuk dari keterlibatan pihak ketiga dalam berbagai bentuk bantuan seperti menjadi fasilitator maupun memfasilitasi penyelesaian konflik yang dirancang untuk membantu para pihak untuk mencapai hasil yang dapat disepakati dan diterima. UE dapat memberikan sarana, sumber daya, fasilitas komunikasi agar proses pencapaian kesepakatan dapat berjalan dengan baik. Pengiriman diplomat maupun representatif resmi dari UE juga merupakan salah satu instrumen diplomasi. Adanya representatif bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan tata administrasi serta berkontribusi untuk melindungi hak-hak masyarakat sipil di wilayah konflik tak jarang representatif juga menjadi bagian dari pemimpin misi perdamaian yang sedang bertugas di wilayah konflik. Dalam aspek militer, salah satunya UE bekerja sama dengan NATO, aspek militer terdiri atas pasukan kemanusiaan yang bertugas untuk menjaga wilayah yang tengah berkonflik utamanya apabila terjadi kerusuhan yang mengancam kondisi keamanan wilayah tersebut dan juga ketika mengancam nyawa penduduk sipil. Salah satu contohnya ialah adanya kerjasama UE dengan NATO tahun 2002, NATO mengirimkan 4.500 pasukan penjaga perdamaian ke Makedonia tahun 2003 untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. Pasukan tersebut kemudian digantikan oleh pasukan Uni Eropa di bawah Operasi Concordia, yang melibatkan 400 tentara dari 26 negara, dan sebuah angkatan kepolisian di bawah Operasi Proxima (Cameron 2006). Operasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan layanan keamanan meliputi polisi dan badan hukum yang efisien dan profesional berdasarkan standar Eropa. Instrumen terakhir yakni

terkait dengan manajemen masyarakat sipil. Salah satunya dengan pengiriman petugas atau penasihat hukum, polisi, administrasi sipil dan adanya misi perlindungan darurat bagi warga sipil. Masing-masing bertujuan untuk mengatasi krisis manajemen yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kontribusinya dapat berbentuk monitor pelayanan publik seperti pendidikan, telekomunikasi, perpajakan, kesehatan, transportasi, serta sarana sumber daya alam baik listrik maupun air. Instrumen-instrumen tersebut merupakan salah satu alat yang dapat menunjukkan kapabilitas UE sebagai aktor dan pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan konflik.

Dalam menyelesaikan konflik, keputusan UE biasanya dipengaruhi oleh faktor humanitarian, perbatasan dan kontrol wilayah, aspek geopolitik, sesuai dengan aliansi serta ketika adanya ekspektasi dan tekanan dunia internasional terhadap UE untuk beraksi (Lavenex 2004). Hubungan atau asosiasi UE dengan negara-negara lain juga menjadi salah satu faktor dalam terlibatnya UE dalam menyelesaikan konflik. Bentuk asosiasi tersebut diantaranya, asosiasi yang komprehensif seperti hubungan UE dengan negara-negara anggota EEA. Asosiasi akses yang biasanya merupakan calon kandidat negara anggota UE yang tergabung dalam CEE, asosiasi dengan negara Afrika dan asosiasi kerjasama transatlantik yakni dengan Amerika Serikat dan juga Kanada. Terakhir yakni asosiasi UE dengan negara-negara non anggota yang tergabung dalam ENP. Upaya menjaga stabilitas kawasan yang dilakukan oleh UE salah satunya melalui upaya penyelesaian konflik. Dalam hal ini adalah asosiasi UE dengan negara yang tergabung dalam ENP yakni Moldova. UE kemudian terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Transnistria.

Konflik Transnistria

Konflik Transnistria tidak lepas dari sejarahnya. Berpusat dari wilayah

Moldova yakni Bessarabia dan Transnistria, wilayah ini masuk kedalam wilayah Rumania sejak abad ke-19. Namun walau demikian secara historis, Transnistria tidak pernah dekat atau menjadi bagian dari Rumania melainkan Ukraina. Dibawah pemerintah Uni Soviet saat itu kemudian dua wilayah tersebut bergabung dalam Moldova, Transnistria sebagai MASSR sedangkan Bessarabia sebagai MSSR. Konflik kemudian mulai terjadi sejak adanya *perestroika* tahun 1986 yang menjadi penanda keterbukaan sekaligus disusul oleh pecahnya Uni Soviet yang kemudian berdampak pada masa depan Moldova. Baik *perestroika* maupun *glasnost* membawa dampak bagi kondisi sosial dan politik yang ada di Moldova. Terdapat gerakan-gerakan yang muncul seperti gerakan nasionalis maupun reformis yang mendukung adanya keterbukaan tersebut. Salah satu gerakan yang paling terkenal ialah *Moldovan Popular Front* (MPF) yang terbentuk pada tahun 1989 gabungan antar gerakan nasionalis dan reformis tersebut. Secara spesifik gerakan ini berfokus pada permasalahan penggunaan bahasa di Moldova. Di tahun yang sama, otoritas tertinggi Moldova mengumumkan adanya undang-undang bahasa, yang mengakibatkan protes dari masyarakat minoritas Moldova. Kedua gerakan tersebut kemudian bergabung pada tahun 1989 dan membentuk *Moldovan Popular Front* yang berfokus pada permasalahan menyangkut bahasa. Tahun 1989 *Supreme Soviet of Moldova* sebagai otoritas tertinggi mengadopsi tiga undang-undang baru mengenai bahasa yakni 1) Menjadikan Moldova sebagai bahasa resmi yang menggunakan aksara latin serta mengakui kesatuan bahasa Moldova dan Rumania. 2) Bahasa Rusia digunakan sebagai bahasa komunikasi (*language of communication*). 3) Bahasa Gagauz harus dilindungi dan dikembangkan serta penggunaan bahasa minoritas lainnya seperti Ukraina dan Bulgaria juga harus dilindungi. Adanya undang-undang tersebut membuat

masyarakat minoritas Moldova yang berbahasa non- Moldova non- Rumania mengadakan pertemuan masal. Terjadi pemogokan dan demokrasi di wilayah Transnistria. Tahun 1990 ketika MPF mendapatkan 40% mandatnya dalam kemenangan pemilu otoritas tertinggi Moldova, gagasan penyatuan dengan Rumania semakin snater terdengar ditambah dengan adanya bendera Moldova yang warnanya banyak mengadopsi bendera Rumania.

Agustus 1990, Moldova resmi memerdekakan diri. Namun Transnistria memiliki kekhawatiran akan hilangnya tradisi dominan dan adanya reunifikasi atau bergabungnya Moldova dan Transnistria, maka kemudian pada September 1990 Transnistria mendeklarasikan kemerdekaan dan terlibat konflik dengan Moldova. Kerusakan terjadi utamanya karena ingin mengambil kendali atas institusi publik. Mulai dari kejadian tersebut kerusakan- kerusakan kerap terjadi. Tahun 1992 Transnistria mengklaim memerdekakan diri namun tidak diakui PBB sebagai negara berdaulat. Akibatnya, Transnistria masih menjadi bagian Republik Moldova dengan status unit teritorial otonomi Transnistria. Pengakuan internasional Moldova pada Maret 1992 mengakibatkan perang di wilayah tersebut, dan cepat berakhir setelah kehadiran intervensi militer Rusia. Sebuah pasukan perdamaian yang terdiri dari Rusia, Moldova dan Transnistrian kemudian didirikan pada Juli 1992 untuk mengawasi zona keamanan di wilayah tersebut. Negosiasi penyelesaian perdamaian dimulai pada tahun 1993 di bawah naungan OSCE menghasilkan format lima pihak yakni pihak yang berkonflik Moldova dan Transnistria, Ukraina dan Rusia yang berfungsi sebagai penjamin perdamaian, dan OSCE.

Konflik Transnistria memiliki dampak yang signifikan bagi kondisi sosial, ekonomi dan politik khususnya di wilayah tersebut. Adanya konflik yang tak kunjung usai mengakibatkan tidak

bisa diaksesnya fasilitas umum secara maksimal oleh publik. Kondisi ekonomi yang masih banyak diwarnai dengan kegiatan ilegal juga diiringi dengan situasi keamanan di transnistria yang juga ilegal. Moldova telah memutuskan untuk memberikan *custom stamps* kepada otoritas Transnistria dan pada tahun 1996 terdapat *common customs area* yang berarti Transnistria dapat melakukan perdagangan termasuk ekspor secara legal dengan *stamps* Moldova (Wrobel 2004). Selain itu Transnistria juga mengandalkan ekspor baja dan tekstil terutama ke negara anggota EU dan Amerika Serikat (Popescu 2005). Adanya tarif yang rendah dari Rusia terhadap gas dan listrik Transnistria kemudian membuat Transnistria mampu bertahan dalam perdagangan terutama ekspor. Transnistria memang bergantung pada Rusia, namun faktanya itu hanya 38% sedangkan sisanya beerjasama dengan pihak barat. Perusahaan-perusahaan Transnistrian seperti Moldavizolit, Moldavkabel, Tighina, Floare, Tirotex, Odema, Moldovan Metal Works (MMZ), dan Vestra semuanya telah menjalin hubungan dengan mitra Barat. perdagangan legal memang telah menyokong kelangsungan Transnistria, namun hal ilegal juga masih banyak terdapat didaerah ini khususnya mengenai perdagangan senjata, maraknya korupsi, dan kegiatan ekonomi ilegal lainnya.

Potensi konflik sangat besar di Transnistria dikarenakan secara geografis merupakan wilayah yang berada di tengah perbatasan dengan Eropa dan Russia, lemahnya kondisi keamanan di Transnistria membuatnya sangat mudah untuk terlibat dalam aktivitas ilegal (penyelundupan senjata, impor ilegal dan ekspor barang, dll. Wilayah yang tidak mendapat pengakuan kedaulatan dan berjalan diluar sistem hukum internasional, kemudian membuat Transnistria menjadi wilayah strategis bagi kegiatan ilegal seperti penyelundupan senjata, produksi dan pasokan senjata serta kegiatan ilegal dan kejahatan

transnasional lainnya. Setidaknya amunisi dan senjata yang diperdagangkan berasal dari dua sumber yakni produksi senjata di Transnistria sendiri serta adanya stok pasokan senjata bekas era Soviet (Benton 2011). Untuk mempertahankan keamanan, Transnistria didukung oleh militer Rusia. Setidaknya terdapat 1500 pasukan ditambah dengan 2500 pasokan senjatam. Hadirnya pasukan militer Rusia sebenarnya bertentangan dengan konstitusi Moldova yang bersikap netral dan pasukan asing tidak dapat ditempatkan di wilayahnya. Dukungan diplomatik maupun militer memang penting bagi Transnistria, namun kemudian hal ini tidak hanya dapat dilihat sebagai penjaga perdamaian namun juga hambatan penyelesaian konflik. Kehadiran pasukan perdamaian memang membekukan situasi namun tidak berarti menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Dengan begitu banyak aktor yang ingin terlibat baik ingin menyelesaikan maupun mendapat keuntungan sepihak dari situasi yang tengah terjadi. Kondisi yang terjadi dalam masyarakat juga semakin memperkeruh suasana. Masih banyak sekali adanya pencucian otak kepada pemuda untuk kemudian ditujukan agar kudeta dapat terlaksana. Hal yang demikian semakin membuat situasi semakin kacau dan menghambat adanya upaya penyelesaian konflik yang ingin dicapai.

Untuk itu kemudian berbagai upaya penyelesaian konflik dilakukan. Upaya ini khususnya dilaksanakan oleh organisasi-organisasi internasional. Pertama yakni CIS yang mengeluarkan resolusi yang mendukung kedaulatan Moldova dan integritas teritorialnya. Namun upayanya kurang memberikan dampak progresif dikarenakan negara yang mendukung resolusi CIS tersebut tiba-tiba membatalkan dukungannya. Selain itu terdapat BSEC yang juga menyediakan forum diskusi dan resolusi yang mendukung Moldova. Namun kurangnya substansi yang dimiliki oleh organisasi tersebut usahanya pun belum

membuahkan hasil. Baik CIS maupun BSEC belum mampu memberikan kontribusinya, hal ini dikarenakan masih lemahnya struktur organisasi sehingga belum dapat mempengaruhi upaya resolusi konflik yang ingin dicapai. Adanya pembatalan negara anggota yang mendukung dapat menunjukkan bahwa organisasi tersebut kurang dapat meyakinkan negara anggotanya untuk dapat bekerjasama mendukung kepentingan organisasi internasional tersebut. Moldova kemudian beralih ke CSCE. Pada tanggal 10 Juli 1992, Moldova meminta agar mekanisme penjaga perdamaian CSCE ke Moldova dipertimbangkan. Namun, salah satu syarat utama terkait masalah gencatan senjata (*cease fire*) belum terpenuhi dan belum dapat disepakati. CSCE yang berganti nama menjadi OSCE memberikan kontribusi yakni membuat proposal awal mengenai *political settlement* antara Moldova dan Transnistria. Pada tahun 1994, Rusia kemudian bergabung dengan OSCE melalui *joint declaration* yang ditandatangani oleh kedua pihak yang sepakat untuk memulai negosiasi mengenai status hukum dan konstitusional Transnistria berdasarkan proposal OSCE. Kesepakatan ini kemudian menuntun pada pembicaraan mengenai penarikan pasukan dan kontrol batas wilayah. Upaya konflik kemudian sempat mengalami titik terang pada tahun 2003 ketika adanya *Kozak Plan* yang bertujuan untuk memfederasikan Moldova. Hal ini kemudian di kritik banyak pihak karena bertentangan dengan prinsip OSCE yang bertujuan menemukan jalan tengah antara partai-partai konflik. Hal inilah yang kemudian membuat *Kozak plan* gagal karena hanya menguntungkan pihak Moldova saja tidak dapat menguntungkan pihak lainnya. Tahun 2003 juga merupakan tahun dimana UE mulai terlibat dalam usaha penyelesaian konflik Transnistria. Selain menjadi mediator, melakukan aksi diplomasi dan negosiasi serta pemberian sanksi, UE juga mulai membahas kemungkinan berkontribusi terhadap operasi dukungan perdamaian di Transnistria.

Upaya Uni Eropa dalam Penyelesaian Konflik Transnistria

Keterlibatan UE dalam konflik Transnistria didorong oleh beberapa faktor pertama karena adanya perluasan. Perluasan UE menjadikan Moldova sebagai negara yang patut diperhatikan utamanya terkait dengan kontrol perbatasan akibat perluasan UE. Di dalam *Commission paper* UE tahun 2002 tentang pendekatan Uni Eropa ke Moldova menyatakan:

“Moldova’s stability clearly matters to the EU. Within a few years, Moldova will be on the borders of an enlarged EU. It has been destabilised by weak government, armed conflict and secession, near economic collapse, organised crime and emigration” (Popescu, 2009).

Moldova merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh UE karena kedepannya Moldova akan berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan UE, apabila kondisi Moldova yang lemah masih adanya konflik yang terjadi, pemerintahan yang lemah, jatuhnya ekonomi, adanya kejahatan ilegal yang terus terjadi maka akan turut mengancam keseimbangan keamanan maupun ekonomi wilayah Eropa, hal-hal tersebut kemudian menjadi salah satu alasan UE untuk lebih dalam masuk kedalam upaya penyelesaian konflik Transnistria. Hal tersebut membuat UE butuh untuk membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Moldova utamanya karena konflik Transnistria. Perluasan kemudian menstimulasi adanya ENP yang kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen UE dalam membantu menyelesaikan konflik yang ada di negara tetangganya. Adanya ENP membuat UE tidak hanya fokus pada negara-negara bagian Eropa barat saja namun juga ke bagian Eropa Timur. Masuknya Rumania pada tahun 2007

kemudian menjadikan UE semakin fokus terhadap upaya penyelesaian konflik Transnistria dikarenakan Moldova kemudian menjadi negara yang berbatasan langsung dengan negara anggota UE sehingga UE harus menjaga kontrol perbatasan tersebut dengan baik. ENP juga didukung oleh adanya keinginan UE untuk terlibat salah satunya dengan mengirimkan representatifnya. Perwakilan khusus ditunjuk untuk Moldova yakni Mr Adriaan Jacobovits de Szeged yang mandatnya adalah:

Apabila kondisi Moldova yang lemah masih adanya konflik yang terjadi, pemerintahan yang lemah, jatuhnya ekonomi, adanya kejahatan ilegal yang terus terjadi maka akan turut mengancam keseimbangan keamanan maupun ekonomi wilayah Eropa

“...to contribute to a peaceful settlement of the Transnistria conflict, to the strengthening of democracy, rule of law, and respect for human rights.” (European Commission, 2005)

Pengiriman *European Union Special Representative* (EUSR) merupakan tanda bahwa UE serius terkait keterlibatannya dalam Transnistria. EUSR akan menjadi perwakilan UE dan menentukan dengan siapa dan apa masalah-masalah

yang harus diselesaikan oleh UE. Penunjukan EUSR dibuat untuk memberikan koherensi internal dan visibilitas eksternal yang lebih besar bagi UE. Aksi diplomatik tersebut juga disertai dengan negosiasi yang dilakukan oleh UE. Selama kepemimpinan Belanda di OSCE pada tahun 2003, UE hadir dalam JCC yang terdiri dari deputi Moldova dan Transnistrian, untuk merancang sebuah konstitusi baru untuk reunifikasi Moldova. Namun sayangnya negosiasi gagal dan belum dapat mencapai kesepakatan. Tapi setidaknya ini menandai perubahan simbolis dalam mekanisme resolusi konflik dengan terlibatnya UE untuk pertama kalinya dalam negosiasi mengenai status Transnistria.

Kedua yakni kondisi ketegangan yang terjadi antara Moldova dan Transnistria.

Tahun 2003- 2004 terdapat kelemahan dalam negosiasi serta mekanisme penjaga perdamaian. Kondisi di Transnistria semakin mengkhawatirkan, terdapat penutupan sekolah bahasa Rumania di Transnistria secara paksa mengakibatkan kerusuhan dan mengancam keamanan wilayah tersebut. Hal ini membuat UE memperpanjang adanya larangan perjalanan bagi pihak Transnistria. Krisis menyebabkan kerusuhan antara Moldova dan milisi Transnistria. Dalam hal ini kemudian meruntuhkan kredibilitas negosiasi maupun pemelihara perdamaian yang saat itu menangani konflik Transnistria. Hal ini kemudian membuat UE terlibat demi menjaga kontrol batas wilayah Moldova. Kontrol perbatasan juga membawa permasalahan baru yang perlu diperhatikan oleh UE yakni adanya masalah migrasi. Migrasi adalah masalah serius dalam hubungan EU dan Moldova. Ini adalah masalah dua sisi yang mencakup migrasi pekerjaan ilegal dari Moldova ke negara-negara Uni Eropa, dan transit migran ilegal dari timur melalui wilayah Moldova. Sejak pertengahan 90an, Moldova telah aktif di pasar kerja UE. hal ini merupakan faktor ekonomi penting terkait dengan pengiriman uang (remittance) dalam pembayaran dari warga negara Moldova yang bekerja di luar negeri yang mencapai 70 juta dolar AS pada tahun 1996 dan 220 juta dolar AS pada tahun 2001, setara dengan 1/3 dari jumlah dari nilai ekspor Moldovan. Namun, 95 persen warga Moldovan yang bekerja di luar negeri bekerja secara ilegal (Gudym dalam Wrobel 2004). Sebagian besar emigran Moldovan bekerja di Rusia, namun sebagian besar dipekerjakan di Negara-negara Anggota UE seperti Italia atau Portugal, dan di negara kandidat, Rumania. Moldova dan Italia menandatangani sebuah kesepakatan mengenai migran pada tahun 2003, yang menetapkan kuota Moldovans yang diizinkan untuk bekerja secara legal di Italia, memberikan bantuan hukum dasar kepada Moldova, dan memasukkan kembali penerimaan. Masalah migrasi pekerjaan adalah salah

satu yang utama - sesuai dengan kepentingan Uni Eropa sejauh hubungannya dengan Moldova.

Ketiga yakni, adanya berbagai macam upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi- negosiasi tidak banyak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan negosiasi berjalan kemudian menghasilkan kondisi yang menguntungkan salah satu pihak saja. Mekanisme lima sisi dan format penjaga perdamaian belum berjalan dan tidak lagi dapat diterima karena negosiasi macet, dan Moldova tidak mempercayai Rusia dan Ukraina, dan operasi penjaga perdamaian dianggap mempertahankan status quo daripada menyelesaikan konflik. Langkah-langkah yang dilakukan di bawah tekanan mediator sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik seperti memberikan perangko kustom Moldovan kepada Transnistria hanya berkontribusi pada Transnistria yang lebih ekonomis. Alih-alih mengubah struktur insentif yang menopang konflik, format negosiasi sebenarnya adalah melegitimasi masing-masing pihak yang malah akan memperkeruh konflik. UE disini diharapkan mampu menjadi pihak ketiga yang mampu memberikan alternatif dan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Terakhir yakni adanya kebijakan Rusia terhadap Moldova, mengakibatkan UE lebih memperhatikan konflik Transnistria. Kebijakan tersebut adalah *Kozak memorandum* hasil dari *Kozak plan* yang menunjukkan adanya diplomasi sepihak yang ingin dijalankan oleh Rusia, sekaligus melemahkan OSCE dan mengganggu format lima pihak dalam penyelesaian konflik ini. *Kozak memorandum* berisi rencana Dmitri Kozak untuk mengembangkan rencana pemukiman sepihak yang hanya akan memperlancar pembukaan jalan bagi kehadiran militer Rusia di Transnistria sampai tahun 2020. Akhir tahun 2002, Rusia gagal menarik pasukan dan pasokan persenjataannya yang telah disepakati dalam kesepakatan di OSCE. Untuk itu kemudian UE lantas terlibat dalam konflik Transnistria untuk

memberikan opsi yang lebih baik. Namun pada tahun 2005, terdapat dialog antara UE dengan Rusia terkait *road map* keamanan. Hal ini menjadi dasar bagi kerjasama khususnya terhadap konflik yang terjadi di negara bekas jajahan Soviet. Dialog keduanya juga bertujuan dalam pengelolaan krisis seperti pemberian inisiatif bersama akan solusi untuk mengatasi penyelesaian konflik regional, khususnya mengenai perbatasan UE dengan Rusia. Hal ini tentu meningkatkan kontribusi UE untuk menyelesaikan konflik Transnistria. Uni Eropa kemudian harus meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Transnistria sesegera mungkin. Diperlukan adanya usaha berkala menuju komitmen dengan Rusia dan pihak separatist sehingga nantinya konflik bisa diakhiri. Jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian gagasan keterlibatan UE secara langsung dalam perundingan harus dipertimbangkan lagi. Uni Eropa juga harus menekan Ukraina untuk memastikan bahwa daerahnya mematuhi kesepakatan yang disepakati bersama Moldova dan menghentikan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan yang tidak terdaftar di perbatasan Moldova. Sebagai tambahan, Brussels harus membujuk Ukraina untuk menerima proposal yang diajukan oleh Moldova untuk menciptakan pos perbatasan di wilayah Ukraina, di sepanjang bagian Transnistria di perbatasan Moldovan-Ukraina. Transnistria sendiri kemudian harus ditekan terkait dengan adanya pabrik senjata serta pasokan senjata dari Rusia yang masih ada di wilayah tersebut. Tentunya hal ini membutuhkan izin dari Rusia, izin tersebut dapat terlaksana apabila terdapat hubungan yang baik berupa kerjasama antara UE dan Rusia untuk bersama-sama menyelesaikan konflik Transnistria.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor tersebut merupakan alasan mengapa UE terlibat dalam konflik Transnistria. Adanya faktor tersebut menunjukkan diperlukannya UE dalam menjaga stabilitas kawasan yang ditunjukkan melalui beberapa upaya penyelesaian konflik. Antara lain pada tahun 2003 Selama kepemimpinan Belanda di OSCE pada, UE hadir dalam JCC yang terdiri dari deputi Moldova dan Transnistria, untuk merancang sebuah konstitusi baru untuk reunifikasi Moldova. Hal ini menandai pertama kalinya pembentukan mekanisme resolusi konflik terlibatnya UE dalam negosiasi kasus Transnistria. Secara berkala, UE berkontribusi dalam penyelesaian konflik Transnistria, dua tahun kemudian pada tahun 2005 terdapat diplomasi aktif melalui EUSR dan peluncuran misi perbatasan oleh UE. Penunjukan EUSR ditujukan untuk menyediakan dan memberikan

Secara berkala, UE berkontribusi dalam penyelesaian konflik Transnistria, dua tahun kemudian pada tahun 2005 terdapat diplomasi aktif melalui EUSR dan peluncuran misi perbatasan oleh UE

keselarasan internal maupun eksternal UE yang lebih besar. Selain itu UE juga membentuk diskusi antar Ukraina dan Moldova serta UE dalam mengatasi kontrol perbatasan wilayah Ukraina dan Moldova.

Kedepannya, UE diharapkan tidak hanya terlibat namun mampu mengatasi konflik yang tengah terjadi. Sebagai organisasi regional yang cukup sukses, UE memiliki potensi, wewenang dan kapabilitas untuk menjaga stabilitas kawasan khususnya dalam menyelesaikan konflik. Untuk melanjutkan keterlibatannya dalam usaha resolusi konflik di Transnistria UE dapat mempertimbangkan beberapa hal. Pertama yakni dapat meningkatkan penggunaan ENP baik untuk mengirimkan dukungan secara diplomatik yakni mengusahakan negosiasi- negosiasi antara Moldova dan Transnistria. Selain itu penggunaan ENP juga dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kondisi politik dan ekonomi Moldova. Meningkatkan

demokrasi Moldova untuk meningkatkan fungsi dalam penyelesaian konflik, sedangkan meningkatkan ekonomi Moldova agar meningkatkan daya tarik bagi Transnistria. Kedua yaitu meningkatkan keterlibatan UE dalam upaya resolusi konflik melalui *conflict settlement*. Seperti memprioritaskan konflik bagian di timur dalam agenda UE dan meningkatkan misi perdamaian di Transnistria.

Ketiga yakni, menjalin hubungan yang baik dengan para pihak seperti Rusia maupun Ukraina. Seperti dalam hal mengontrol perbatasan, dapat diwujudkan melalui pembentukan pos perbatasan di daerah sekitar perbatasan Moldova dan Ukraina. Menemukan pendekatan yang lebih koheren dengan Rusia. Khususnya dalam menemukan solusi untuk menarik pasukan Rusia dari wilayah Transnistria yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Serta melanjutkan kerja sama dengan Rusia dalam bidang ekonomi dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi Eropa, pasar terbuka, memperbaiki kondisi sosial dan peraturan hukum. Terakhir yakni melakukan pendekatan terhadap Transnistria dan Moldova. Seperti misalnya membuat keterlibatan UE dapat diterima oleh elit Transnistria melalui adanya penjaminan atau keterbukaan dalam proses resolusi konflik. Rencana Aksi di Transnistria juga, dengan fokus pada politik dan isu terkait demokrasi, yakni dengan memberikan sanksi lebih luas terhadap pendukung rezim serta merevisi larangan perjalanan. Selain itu UE juga dapat meningkatkan kondisi sosial di Moldova dan Transnistria, seperti misalnya membuka akses pendidikan dengan melibatkan kedua pihak ke dalam program pertukaran pelajar maupun program pendidikan lainnya.

Dalam penulisan penulis menyadari masih banyak kekurangan. Analisis mengenai regionalisme seringkali berfokus pada gambaran besar fenomena hubungan internasional sehingga seringkali mengurangi fokus

pada hal hal detil, begitu juga pada skripsi ini fokus pada keterlibatan Uni Eropa masih menggunakan telaah tingkatan umum sehingga faktor faktor spesifik seperti aktor-aktor kunci atau aktor-aktor lain tidak dibahas, begitu juga dengan faktor pengaruh lain diluar faktor hubungan regionalisme seperti ekonomi hingga sosial budaya yang bukan tidak mungkin memainkan peran dalam mendorong Uni Eropa terlibat dalam konflik Transnistria. Oleh karena itu masih banyak hal yang dapat dikupas tidak hanya dari sudut pandang UE saja namun juga faktor domestik kondisi Moldova maupun pihak lainnya. Selain itu, penulis juga menyadari bahwa analisis pada tingkat regionalisme membuat adanya kondisi bias pada EU namun hal ini tidak lantas membuat fokus penelitian bergeser dikarenakan yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah alasan besar dibalik keterlibatan Uni Eropa tersebut. Konsekuensi dari keputusan itu adalah bahwa analisis mengenai pengambilan keputusan dan dinamika internal Uni Eropa tidak terlalu banyak dibahas. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya penelitian-penelitian lebih lanjut pada masa mendatang, untuk dapat menyempurnakan penelitian ini, utamanya dalam mengidentifikasi bagian-bagian kunci seperti faktor determinan ekonomi, determinan sosial budaya, keterlibatan pihak lain sebagai faktor penarik dan pendorong regionalisme hingga analisis identitas Eropa pada keterlibatan Uni Eropa di Transnistria.

Selain itu penulis lain juga dapat mengupas lebih dalam terkait dengan topik regionalisme dan kestabilan kawasan utamanya terkait dengan studi kasus melalui penyelesaian konflik. Dikarenakan tulisan ini tidak banyak membahas aspek penyelesaian konflik seperti langkah-langkah sistemik ataupun langkah-langkah spesifik untuk mengatasi konflik. Pun begitu tulisan ini juga tidak mengukur sejauh mana keberhasilan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Uni Eropa di Transnistria. Hal ini mengingat konflik Transnistria masih terus berlangsung

hingga sekarang dan masih menjadi salah satu konflik beku yang didalamnya terlibat banyak aktor untuk menyelesaikannya dengan berbagai caranya masing-masing. Faktor tersebut juga dapat menjadi aspek bagi peneliti

lain untuk dapat berkontribusi mengisi analisis dalam diskursus mengenai keterlibatan regionalisme dalam konflik hingga upaya-upaya penyelesaian konflik beku di Transnistria.

Daftar Pustaka

- Bercovitch, J., 1999, *Mediation and Negotiation Techniques*, Encyclopedia of violence, peace and conflict, 2, hal. 403-412.
- Cameron, Fraser. 2006, *The European Neighborhood Policy As A Conflict Prevention Tool*, European Policy Centre - Conflict Prevention Partnership Publication.
- Dannreuther, R. 2004, 'European Union Foreign and Security Policy - Towards a Neighborhood Policy', *International Organization*, Vol. 56, No. 1.
- Diez, Thomas, Manners, Ian & Whitman Richard G. 2011, 'The Changing Nature of International Institutions in Europe: the Challenge of the European Union', *Journal of European Integration*, 33:2, 117-13
- Downs, William M. 2002, 'Regionalism in the European Union: Key Concepts and Project Overvie', *Journal of European Integration*, 24:3.
- European Union External Action. 2016, *European Neighborhood Policy* [online] dalam http://eeas.europa.eu/headquarter/homepage_en/330_European_Neighborhood_Policy diakses pada 20 april 2017.
- Kamos, Georgi. tt. *EU's Role in Conflict Resolutions: The Case of the Eastern Enlargement & Neighborhood Policy Area*.
- Lavenex, Sandra. 2004, 'EU external governance in wider Europe', *Journal of European Public Policy*' halaman 680-700.
- Peterka-Benton, Daniela. 2012. 'Arms Trafficking in Transnistria: A European Security Threat?'. *Journal of Applied Security Research*, 7(1), hal 71-92.
- Popescu, Nicu. 2009, *Stealth Intervention: The EU and Post-Soviet Conflicts*, Central European University, Budapest.
- Smith, Anthony D. 1991, *National Identity*, Penguin, London.
- Tocci, Nathalie. 2004, 'Conflict Resolution in the European Neighborhood: The Role of EU as a framework and as an actor', *EUI Working papers ESCAS* No. 2004/29.
- Wrobel, Jacek. 2004, 'The European Union and Moldova', *CES Studies*, 13, hal 60-72.